

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN BARENG KABUPATEN JOMBANG

Nama	: USMAN
NIP	: 197108061998031007
Jabatan	: Camat Bareng
Tugas Pokok	: Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Fungsi	: 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat 3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati 5. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan 7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan 8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan 9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan(IKKK) adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat capaian kinerja kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan umum dan pelayanan kepada masyarakat di wilayahnya.Indeks ini dihitung berdasarkan hasil penilaian terhadap 6 aspek kinerja kecamatan: 1. Aspek Penunjang Urusan Pemerintahan Umum 2.Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 3. Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 4. Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum 5. Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 6. Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan Bareng tahun n	Laporan Hasil Evaluasi IKKK Kec.Bareng
2	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	Reformasi Birokrasi adalah perubahan mendasar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan, yang bertujuan untuk membangun birokrasi pemerintah yang akuntabel, kapabel, dan mampu memberikan pelayanan publik yang prima Tujuan utama pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing,sehingga mampu mendorong percepatan pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik oleh pemerintah daerah Penilaian Reformasi Birokrasi dilakukan melalui dua komponen utama, yaitu: 1. Capaian Strategi Pelaksanaan RB PD 2. Capaian Sasaran Strategis Pelaksanaan RB PD	$IKPP = ((IKM \times 2,5) + (IPP \times 2)) / 2$	Laporan Hasil Evaluasi IKPP Kec.Bareng (Hasil Survey IKM Kec. Bareng melalui https://sukmasant.ri.jombangkab.go.id dan Laporan Hasil Evaluasi IPP Kec.Bareng)

No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) merupakan nilai gabungan yang menggambarkan persepsi yang sama terhadap tingkat kualitas kinerja pelayanan publik. Indeks ini berfungsi sebagai alat ukur yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai seberapa baik kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Dalam konteks peningkatan mutu layanan, Pemerintah Kabupaten Jombang menilai pentingnya memahami kualitas pelayanan publik secara menyeluruh, baik dari sisi kepuasan masyarakat maupun komitmen penyelenggara layanan. Oleh karena itu, digunakan dua indikator utama yang saling melengkapi, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Pelayanan Publik (IPP). 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) IKM mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah. Nilai ini diperoleh melalui survei yang dilaksanakan berdasarkan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 2. Indeks Pelayanan Publik (IPP) Sementara itu, IPP digunakan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara lebih sistematis di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Penilaian ini mencakup enam aspek utama sesuai Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2017	$IKPP = ((IKM \text{ non konversi} \times 2,5) + (IPP \times 2)) / 2$	Laporan Hasil Evaluasi IKPP Kec. Bareng (Hasil Survey IKM Kec. Bareng melalui https://sukmasantri.jombangkab.go.id dan Laporan Hasil Evaluasi IPP Kec. Bareng)

Atasan Langsung

WARSUBI
NIP. -

Jombang, 19 Januari 2026
CAMAT


USMAN
NIP.19710806 199803 1 007

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
KECAMATAN BARENG KABUPATEN JOMBANG

Nama	: AGUS SUPRIANTO
NIP	: 196804221993121002
Jabatan	: Sekretaris Kecamatan Bareng
Tugas Pokok	: Melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program dan evaluasi
Fungsi	: 1. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum; 2. Pengelolaan administrasi kepegawaian; 3. Pengelolaan administrasi keuangan; 4. Pengelolaan administrasi perlengkapan; 5. Pengelolaan urusan rumah tangga; 6. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan; 7. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas- tugas Seksi; 8. Pengelolaan kearsipan; 9. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana; 10. Pelaksanaan pengelolaan aset Kecamatan; dan 11. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Bareng	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (AKIP) adalah Pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).Penyelenggaraan SAKIP meliputi 4 komponen 1. Perencanaan Kinerja 2.Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Bareng tahun n	Laporan Hasil Evaluasi AKIP Kec.Bareng
2	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah merupakan ukuran yang menilai sejauh mana perangkat daerah memiliki,menyusun, dan memanfaatkan dokumen perencanaan serta evaluasi kinerja secara optimal. Aspek ini menggambarkan keberadaan,kualitas, dan fungsi dokumen seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja),Perubahan Renja, serta dokumen evaluasi seperti Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Laporan Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran Triwulanan Penilaian aspek ini menekankan pentingnya penggunaan dokumen-dokumen tersebut sebagai alat pengendalian dan pengukuran kinerja yang sistematis, terukur, dan akuntabel. Dengan demikian, perangkat daerah diharapkan mampu mengelola perencanaan dan pelaporan kinerja secara terpadu guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara efektif	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah tahun n	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Capaian Kinerja PD
3	Tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	Laporan Keuangan Perangkat Daerah merupakan ukuran yang menilai sejauh mana perangkat daerah mampu menyusun, menyajikan, dan menyampaikan laporan keuangan secara lengkap, akurat, dan tepat waktu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Aspek ini menggambarkan peran laporan keuangan sebagai alat pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja keuangan, yang berfungsi untuk menilai efektivitas pengelolaan anggaran serta memastikan penggunaan keuangan daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah tahun n	Laporan Keuangan PD

No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
4	Tersusunnya laporan penyediaan barang dan jasa	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	Laporan Penyediaan Barang dan Jasa merupakan suatu ukuran yang menggambarkan kemampuan perangkat daerah dalam menyusun, mencatat,dan melaporkan seluruh kegiatan pengadaan,pemeliharaan, distribusi, serta penggunaan barang dan jasa secara tepat waktu, akurat,transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan ini berfungsi sebagai alat pengendalian, monitoring,dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan barang dan jasa di lingkungan perangkat daerah Pelaporan penyediaan barang dan jasa dilaksanakan secara rutin setiap bulan guna memastikan seluruh proses pengelolaan berjalan tertib administrasi, e?sien, dan sesuai dengan prinsip transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Komponen penyediaan barang dan jasa yang dilaporkan meliputi: 1. Instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor, 2. Peralatan dan perlengkapan kantor, 3. Bahan logistik kantor, 4. Barang cetakan dan penggandaan, 5. Bahan bacaan serta peraturan perundang-undangan, dan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa tahun n	Laporan penyediaan barang dan jasa PD
5	Tersusunnya laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD)Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan ukuran yang menilai sejauh mana perangkat daerah mampu melaksanakan proses penyusunan, pencatatan, dan pelaporan terhadap seluruh kegiatan pemeliharaan, perawatan, serta perbaikan aset atau barang milik daerah. Kegiatan ini dilaksanakan secara tepat waktu,akurat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat memastikan ketersediaan, fungsi optimal, dan umur pakai BMD tetap terjaga Laporan ini berfungsi sebagai alat pengendalian dan pertanggungjawaban pengelolaan aset daerah,sekaligus menjadi dasar evaluasi efektivitas penggunaan sumber daya dalam menjaga keberlanjutan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pemerintahan. Melalui penyusunan laporan yang baik, kecamatan dapat memastikan bahwa pemeliharaan aset dilakukan secara terencana, e?sien, dan memberikan nilai manfaat yang berkelanjutan bagi penyelenggaraan pelayanan publik Adapun komponen laporan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah meliputi: 1.Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, serta pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan 2,Pemeliharaan atau rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya 3. Pemeliharaan atau rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah tahun n	Laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
6	Tersusunnya laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah (BMD)Penunjang Urusan Pemerintah Daerah merupakan suatu ukuran yang menggambarkan kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan proses penyusunan, pencatatan, dan pelaporan kegiatan pengadaan serta penggunaan Barang Milik Daerah secara tepat waktu, akurat, transparan,dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pelaporan ini memiliki fungsi strategis dalam memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung operasional pemerintahan serta menjamin akuntabilitas pengelolaan aset daerah. Dengan tersedianya laporan yang lengkap dan tepat waktu,pemerintah kecamatan dapat melakukan pengendalian, perencanaan kebutuhan, serta evaluasi efektivitas pemanfaatan aset secara berkelanjutan. Adapun komponen laporan pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah meliputi: 1. Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya, sebagai sarana utama mendukung pelaksanaan pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan 2. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya,yang mencakup peralatan, perlengkapan, serta infrastruktur penunjang kegiatan operasional aparatur.	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tahun n	Laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
7	Tersusunnya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan suatu ukuran yang menilai sejauh mana perangkat daerah mampu melaksanakan proses penyusunan,pencatatan, dan pelaporan terhadap seluruh kegiatan penyediaan jasa yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Proses tersebut dilakukan secara tepat waktu, akurat,transparan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaporan ini memiliki peran penting dalam memastikan tersedianya jasa penunjang yang mendukung kelancaran operasional pemerintahan, sekaligus menjadi alat pengendalian dan pertanggungjawaban atas pemanfaatan sumber daya jasa yang digunakan. Melalui laporan ini,kecamatan dapat memantau e?siensi penggunaan jasa penunjang, menilai kebutuhan operasional, serta memastikan kesesuaian antara penggunaan jasa dengan prinsip efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan pemerintahan. Adapun komponen laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah meliputi: 1.Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air,dan listrik 2. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tahun n	Laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

Atasan Langsung

Jombang, 19 Januari 2026
Sekretaris


USMAN
NIP.19710806 199803 1 007


AGUS SUPRIANTO
NIP. 19680422 199312 1 002

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
KECAMATAN BARENG KABUPATEN JOMBANG

Nama	: MOHAMMAD SAIFUL
NIP	: 196805291992021001
Jabatan	: Kepala Seksi Tata Pemerintahan
Tugas Pokok	: 1. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di lingkungan Kecamatan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; 2. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil; 3. Melaksanakan pelaksanaan urusan wajib Kabupaten dan urusan lain tingkat Kecamatan sesuai bidangnya; 4. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan aparatur dan administrasi pemerintahan desa; 5. Melaksanakan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; 6. Melaksanakan evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan kepada Bupati; 7. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN); 8. Melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan dan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat di Kecamatan; 9. Melaksanakan tugas pembantuan; dan 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
Fungsi	:

No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya kinerja aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Bareng	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah, khususnya di tingkat kecamatan, mampu melaksanakan fungsi pemerintahan umum sekaligus memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Penilaian terhadap aspek ini mencerminkan kemampuan kecamatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk memperoleh gambaran yang komprehensif, penilaian aspek ini mencakup beberapa komponen utama, yaitu: 1. Nilai Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN); 2. Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (IKM); 3. Nilai Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (IPP); 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat; 5. Pelaksanaan delegasi wewenang dari Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 6. Peran kecamatan dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 7. Pelaksanaan kebijakan yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; 8. Terselenggaranya Rumah Bersama Kecamatan sebagai wadah koordinasi lintas sektor; 9. Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di wilayah kecamatan; serta 10. Inovasi atau kreativitas kecamatan dalam pelayanan publik yang mendukung peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat	Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Bareng tahun n	Laporan Hasil Evaluasi Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kec. Bareng

No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
2	Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indikator ini mengukur tingkat efektivitas dan kualitas pelaksanaan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kecamatan Bareng melalui penyusunan laporan peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat. Laporan tersebut berisi hasil identi?kasi kendala pelayanan, upaya perbaikan, inovasi pelayanan, serta tindak lanjut peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan tahun n	Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat
3	Meningkatnya kinerja aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Bareng	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa merupakan indikator yang menilai sejauh mana kecamatan mampu menjalankan fungsi pembinaan, pendampingan,serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayahnya. Aspek ini mencerminkan peran kecamatan dalam memastikan agar penyelenggaraan pemerintahan desa berlangsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,berlandaskan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), serta berkontribusi pada peningkatan kinerja aparatur desa dan akuntabilitas pemerintahan desa. Komponen penilaian dalam aspek ini adalah Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Bareng tahun n	Laporan Hasil Evaluasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kec. Bareng
4	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Indikator ini mengukur tingkat pelaksanaan fasilitasi oleh Kecamatan Bareng dalam membantu Pemerintah Desa mengelola keuangan dan mendayagunakan aset desa secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen yang difasilitasi meliputi dokumen perencanaan, pelaksanaan,penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa,serta dokumen pendayagunaan aset desa yang dihasilkan melalui kegiatan pembinaan, konsultasi, atau pendampingan oleh pihak kecamatan	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa tahun n	- Laporan Pengelolaan Keuangan Desa - Laporan Aset Desa

Atasan Langsung


USMAN
NIP.19710806 199803 1 007

Jombang, 19 Januari 2026
Kepala Seksi Tata Pemerintahan


MOHAMMAD SAIFUL
NIP. 19680529 199202 1 001

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
KECAMATAN BARENG KABUPATEN JOMBANG

Nama	: SUDARNO
NIP	: 196806281992031005
Jabatan	: Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tugas Pokok	: 1. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan; 2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta terhadap perangkat Desa dan Kelurahan serta tertib administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan; 3. Melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh Perangkat daerah maupun swasta; 4. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan; 5. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat; 6. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bidang PKK; dan 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
Fungsi	:

No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya kinerja aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Bareng	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan merupakan indikator yang menggambarkan kemampuan kecamatan dalam menjalankan fungsi fasilitasi,pembinaan, serta pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Aspek ini menilai sejauh mana kecamatan berperan aktif dalam mendorong partisipasi masyarakat desa dan kelurahan untuk mengelola potensi dan sumber daya secara mandiri,partisipatif, serta berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penilaian terhadap aspek ini mencakup dua komponen utama, yaitu: 1, Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan 2. Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat	Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Bareng tahun n	Laporan Hasil Evaluasi Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kec.Bareng
2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	Indikator ini mengukur tingkat keterlibatan lembaga kemasyarakatan desa dalam proses perencanaan pembangunan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa(Musrenbangdes). Lembaga kemasyarakatan yang dimaksud mencakup unsur-unsur masyarakat seperti PKK, LPMD, Karang Taruna,RT, RW, Posyandu yang berperan aktif dalam penyampaian aspirasi serta perumusan prioritas pembangunan desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa tahun n	Laporan kegiatan Musrenbangdes

No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
3	Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indikator ini mengukur sejauh mana perangkat kecamatan melaksanakan, memfasilitasi, dan mengevaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat secara efektif melalui penyusunan laporan yang menggambarkan hasil, capaian, dan tindak lanjut dari kegiatan tersebut. Pemberdayaan masyarakat yang dimaksud mencakup kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan kelembagaan lokal, pengembangan potensi ekonomi, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di tingkat desa maupun kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan tahun n	Laporan hasil kegiatan pemberdayaan masyarakat

Atasan Langsung



USMAN
NIP.19710806 199803 1 007

Jombang, 19 Januari 2026
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA



SUDARNO
NIP. 19680628 199203 1 005

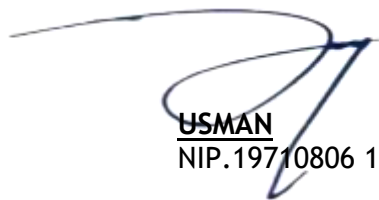
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
KECAMATAN BARENG KABUPATEN JOMBANG

Nama	: SLAMET MARDIIN
NIP	: 197406042010011003
Jabatan	: Plt. Kepala Seksi Sosial Budaya
Tugas Pokok	: 1. Melaksanakan penyelenggaraan pengumpulan bahan dan data pelaksanaan, evaluasi di bidang sosial budaya; 2. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang sosial budaya; 3. Melaksanakan penyelenggaraan administrasi bidang sosial budaya; 4. Melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi terhadap lembaga keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda, olahraga, ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat; 5. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan; 6. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan di tingkat Kecamatan; dan 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
Fungsi	:

No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya kinerja aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Bareng	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah, khususnya di tingkat kecamatan, mampu melaksanakan fungsi pemerintahan umum sekaligus memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Penilaian terhadap aspek ini mencerminkan kemampuan kecamatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk memperoleh gambaran yang komprehensif, penilaian aspek ini mencakup beberapa komponen utama, yaitu: 1. Nilai Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN); 2. Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat(IKM); 3. Nilai Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (IPP); 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat; 5. Pelaksanaan delegasi wewenang dari Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 6. Peran kecamatan dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 7. Pelaksanaan kebijakan yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; 8.Terselenggaranya Rumah Bersama Kecamatan sebagai wadah koordinasi lintas sektor; 9. Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di wilayah kecamatan; serta 10. Inovasi atau kreativitas kecamatan dalam pelayanan publik yang mendukung peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat	Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Bareng tahun n	Laporan Hasil Evaluasi Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kec. Bareng

No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
2	Meningkatnya efektivitas pelayanan kepada masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah kecamatan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja kecamatan dalam meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat melalui pelaksanaan fungsi koordinasi, pendampingan, dan pemantauan terhadap pemenuhan SPM oleh perangkat daerah dan/atau pemerintah desa. Fasilitasi tersebut mencakup kegiatan identifikasi permasalahan capaian SPM, koordinasi lintas sektor, pendampingan pelaksanaan program dan kegiatan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap tindak lanjut percepatan pencapaian SPM.	laporan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan tahun n	laporan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan
3	Meningkatnya kinerja aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Bareng	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum merupakan ukuran yang menilai kemampuan kecamatan dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan umum di wilayahnya. Aspek ini mencerminkan sejauh mana kecamatan berperan dalam membina ideologi Pancasila, menumbuhkan wawasan kebangsaan, memperkuat kerukunan masyarakat, serta mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan lintas sektor. Selain itu, aspek ini juga menilai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab camat dan tidak termasuk dalam urusan pemerintahan daerah maupun desa. Komponen penilaian dalam aspek ini meliputi: 1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 2. Pembinaan Kerukunan Antarsuku, Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya 3. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimcam)	Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Bareng tahun n	Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kec. Bareng
4	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Indikator ini mengukur jumlah peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa yang diselenggarakan oleh Kecamatan Bareng dalam satu tahun anggaran. Kegiatan pembinaan dimaksud bertujuan untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, memperkuat wawasan kebangsaan, serta memelihara kerukunan dan toleransi antarwarga di wilayah kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa tahun n	Laporan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
5	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Indikator ini mengukur jumlah dokumen yang dihasilkan dari pelaksanaan tugas dan kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimcam) selama satu tahun anggaran. Dokumen dimaksud berupa rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari kegiatan Forkopimcam dalam rangka menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat di wilayah Kecamatan Bareng. Pelaksanaan tugas Forkopimcam melibatkan unsur pimpinan kecamatan, Kapolsek, Danramil, dan instansi vertikal terkait lainnya untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian berbagai permasalahan pemerintahan, sosial, dan kemasyarakatan di tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan tahun n	Laporan Pelaksanaan kegiatan Forkopimcam

Atasan Langsung



USMAN
NIP.19710806 199803 1 007

Jombang, 19 Januari 2026
Plt Kepala Seksi Sosial Budaya



SLAMET MARDIIN
NIP. 19670408 199302 1 004

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
KECAMATAN BARENG KABUPATEN JOMBANG

Nama	: MIFTA PRADITAMA
NIP	: 198603212015051001
Jabatan	: Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Tugas Pokok	: 1. Melaksanakan penyusunan program guna menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat; 2. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan bencana; 3. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan perangkat Kecamatan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat; 4. Melaksanakan penyelenggaraan pengendalian operasional Polisi Pamong Praja Kecamatan; 5. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, pihak lain termasuk TNI/POLRI dan Pemuka Agama di wilayah kerjanya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan; 6. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; 7. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 8. Melaksanakan laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati; 9. Melaksanakan pengamanan kantor Kecamatan dan rumah dinas Camat; dan 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
Fungsi	:

No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya kinerja aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Bareng	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum	Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan indikator yang menggambarkan sejauh mana kecamatan mampu menjaga dan meningkatkan kondisi ketentraman serta ketertiban masyarakat di wilayahnya. Aspek ini menilai peran kecamatan dalam melaksanakan fungsi pencegahan, penanganan,serta penegakan hukum terhadap berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui koordinasi lintas sektor secara efektif dan terukur.Komponen penilaian aspek ini meliputi dua unsur utama, yaitu: 1. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan 2. Penanganan bencana di tingkat kecamatan	Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Bareng tahun n	Laporan Hasil Evaluasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kec. Bareng

No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
2	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Indikator ini mengukur tingkat pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sinergi antara Kecamatan Bareng dengan perangkat daerah maupun instansi vertikal, khususnya yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penegakan peraturan perundang-undangan serta ketertiban umum, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Laporan koordinasi/sinergi disusun sebagai bentuk dokumentasi dan pertanggungjawaban atas kegiatan bersama yang dilakukan, baik dalam bentuk rapat koordinasi, patroli bersama, sosialisasi, penertiban, maupun kegiatan penegakan hukum lainnya di wilayah Kecamatan Bareng	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah tahun n	Laporan Koordinasi/Sinergi Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Atasan Langsung



USMAN
NIP.19710806 199803 1 007

Jombang, 19 Januari 2026
Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum



MIFTA PRADITAMA
NIP. 19860321 201505 1 001

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

KECAMATAN BARENG KABUPATEN JOMBANG

Nama

:

MIFTA PRADITAMA

NIP

:

198603212015051001

Jabatan

:

Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi

Tugas Pokok

:

1. Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
2. Menyusun rencana program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
3. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
4. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan;
5. Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta melaksanakan tata usaha keuangan;
6. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;
7. Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan;
8. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

Fungsi

:

No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah jumlah total dokumen perencanaan yang disusun oleh perangkat daerah pada tahun berjalan(tahun n), yang meliputi Rencana Strategis (Renstra)dan Rencana Kerja (Renja).Indikator ini menggambarkan tingkat ketersediaan dan ketertiban perangkat daerah dalam menyusun dokumen perencanaan sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan tahunan maupun jangka menengah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah tahun n	Dokumen Perencanaan Perangkat DaerahDokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah jumlah total dokumen laporan yang disusun oleh setiap perangkat daerah untuk menunjukkan tingkat pencapaian kinerja dan realisasi pelaksanaan program/kegiatan. Laporan ini disusun secara periodik setiap triwulan serta tahunan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP),dan merupakan hasil koordinasi serta fasilitasi penyusunan oleh perangkat daerah yang berwenang.	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tahun n	Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
3	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN adalah jumlah Aparatur Sipil Negara(ASN) di lingkungan perangkat daerah yang mendapatkan pembayaran gaji pokok serta tunjangan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan hak kepegawaiannya dalam tahun anggaran berjalan(tahun n).	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN tahun n	Dokumen gaji dantunjangan ASN

No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
4	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD merupakan jumlah keseluruhan dokumen administrasi keuangan yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selama tahun anggaran berjalan (tahun n). Dokumen ini mencerminkan proses pencatatan, pengujian, serta verifikasi terhadap setiap pengeluaran anggaran, yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan anggaran dilakukan secara akurat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD tahun n	Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Perangkat Daerah
5	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD merupakan jumlah keseluruhan dokumen administrasi keuangan yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selama tahun anggaran berjalan (tahun n). Dokumen ini mencerminkan proses pencatatan, pengujian, serta verifikasi terhadap setiap pengeluaran anggaran, yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan anggaran dilakukan secara akurat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD tahun n	Laporan Keuangan Perangkat Daerah

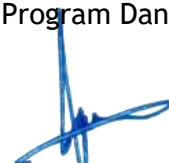
Atasan Langsung



AGUS SUPRIANTO
NIP. 19680422 199312 1 002

Jombang, 19 Januari 2026

Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program Dan Evaluasi



MIFTA PRADITAMA
NIP. 19860321 201505 1 001

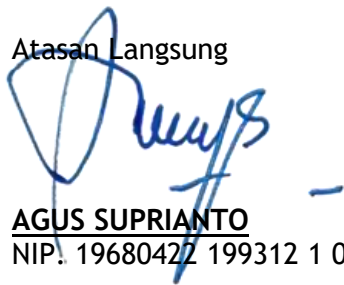
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
KECAMATAN BARENG KABUPATEN JOMBANG

Nama	: RISDIANTO
NIP	: 197507282010011004
Jabatan	: Plt. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Tugas Pokok	: 1. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian; 2. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan; 3. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas; 4. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Kecamatan; 5. Menghimpun data aset dan melaksanakan ketatausahaan barang; 6. Mengkoordinasikan dan menyusun Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal; 7. Melaksanakan program dan pembinaan pelayanan di bidang informasi dan komunikasi; 8. Melaksanakan kegiatan kehumasan, publikasi, dan dokumentasi; dan 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
Fungsi	:

No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
1	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Indikator ini mengukur jumlah paket komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor yang disediakan dan didokumentasikan untuk memastikan tersedianya sarana kelistrikan dan penerangan yang memadai bagi pelaksanaan kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan tahun n	Laporan SPJ
2	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Indikator ini mengukur jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan serta didokumentasikan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan pelayanan administrasi pemerintahan di lingkungan Kecamatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan tahun n	Laporan SPJ
3	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Indikator ini mengukur jumlah paket barang cetakan dan penggandaan dokumen yang disediakan serta didokumentasikan sebagai bagian dari dukungan operasional kegiatan administrasi pemerintahan di lingkungan Kecamatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan tahun n	Laporan SPJ
4	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Indikator ini mengukur jumlah paket penambah daya tahan tubuh yang disediakan untuk mendukung kegiatan operasional dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan tahun n	Laporan SPJ
5	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Indikator ini menggambarkan jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan untuk menunjang peningkatan wawasan, pemahaman regulasi, serta pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur di lingkungan Kecamatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan tahun n	Laporan SPJ

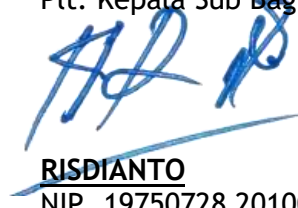
No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
6	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Indikator ini menggambarkan jumlah laporan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan oleh Kecamatan Bareng bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait,dalam rangka menyinergikan kebijakan,program, dan pelaksanaan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD tahun n	Laporan SPJ
7	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Indikator ini menggambarkan jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan oleh Kecamatan Bareng dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan,pelayanan publik, serta kegiatan administrasi perkantoran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan tahun n	Laporan SPJ
8	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Indikator ini menggambarkan jumlah laporan yang disusun terkait penyediaan jasa pelayanan umum kantor, yang meliputi kegiatan pendukung administrasi dan operasional perkantoran seperti pembayaran honorarium, asuransi pegawai, serta jasa pendukung lainnya yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan tahun n	Laporan SPJ
9	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Indikator ini mengukur jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan milik Kecamatan yang mendapatkan pemeliharaan rutin dan penyelesaian kewajiban administrasi berupa pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB)dan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan(STNK) dalam satu tahun anggaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya tahun n	Laporan SPJ
10	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya PD yang Dipelihara atau Direhabilitasi	Indikator ini mengukur jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya milik perangkat daerah (PD) yang telah dilakukan kegiatan pemeliharaan atau rehabilitasi ?sik dalam satu tahun anggaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya PD yang Dipelihara atau Direhabilitasi tahun n	Laporan SPJ
11	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara atau Direhabilitasi	Indikator ini mengukur jumlah unit sarana dan prasarana yang terdapat pada gedung kantor atau bangunan lainnya milik perangkat daerah yang telah dilakukan kegiatan pemeliharaan atau rehabilitasi dalam satu tahun anggaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara atau Direhabilitasi tahun n	Laporan SPJ
12	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Indikator ini menggambarkan jumlah laporan yang disusun terkait penyediaan dan pemanfaatan jasa komunikasi,sumber daya air, dan listrik dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Bareng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan tahun n	Laporan SPJ

Atasan Langsung



AGUS SUPRIANTO
NIP. 19680422 199312 1 002

Jombang, 19 Januari 2026
Plt. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



RISDIANTO
NIP. 19750728 201001 1 004